



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 189 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan Pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6246);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Bupati adalah Bupati Siak.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
7. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
10. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan ASN pada Dinas Lingkungan Hidup digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan Aparatur Sipil Negara berdasarkan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB II KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan ASN;
 - b. rekrutmen calon ASN;
 - c. penempatan ASN;
 - d. pengendalian ASN;
 - e. pendidikan dan pelatihan ASN;
 - f. pengembangan ASN; dan
 - g. kesejahteraan ASN.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
 - c. Bagian Organisasi.

BAB III

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi Jabatan, meliputi:
 - a. identitas Jabatan;
 - b. ikhtisar Jabatan;
 - c. kualifikasi Jabatan;
 - d. tugas pokok;
 - e. hasil kerja;
 - f. bahan kerja;
 - g. perangkat kerja;
 - h. tanggung jawab;
 - i. wewenang;
 - j. korelasi Jabatan;
 - k. kondisi lingkungan kerja;
 - l. risiko bahaya;
 - m. syarat Jabatan;
 - n. prestasi kerja; dan
 - o. kelas Jabatan.
- (3) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit organisasi administrator yang secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak lain seperti Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam bentuk tenaga ahli, narasumber dan tim baik dalam bentuk asistensi maupun bimbingan teknis.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bagian Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Bagian Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Siak Nomor 137 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 137);
- b. Peraturan Bupati Siak Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 137 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 50);
- c. Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 137 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 14);
- d. Peraturan Bupati Siak Nomor 7.a Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 137 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7.a);
- e. Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 137 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 22); dan
- f. Peraturan Bupati Siak Nomor 55 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 137 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 55);

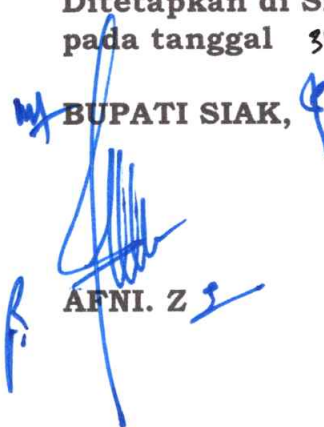
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SIAK,

AFNI. Z 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 189

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Kepala Dinas	1					
	1) Sekretaris		1				
	1. Kasubbag Perencana dan Umum			1			
	1) JF Perencana Ahli Muda					1	
	2) JF Pranata Komputer Ahli Muda					1	
	3) JF Arsiparis Ahli Muda					2	
	4) JF Arsiparis Ahli Pertama					2	
	5) JF Arsiparis Penyelia					1	
	6) JF Arsiparis Mahir					1	
	7) JF Pranata Komputer Mahir					1	
	8) JF Arsiparis Terampil					2	
	9) Penelaah Teknis Kebijakan				7		
	10) Penata Layanan Operasional				5		
	11) Pengolah Data dan Informasi				4		
	12) Pengadministrasi Perkantoran				8		
	13) Operator Layanan Operasional				3		
	14) Pengelola Umum Operasional				1		
	2. Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian			1			
	1) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					1	
	2) JF Pranata Komputer Terampil					1	
	3) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	4) Penata Layanan Operasional				5		
	5) Pengolah Data dan Informasi				3		
	6) Pengadministrasi Perkantoran				3		
	7) Operator Layanan Operasional				2		
	2) Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup (P2LH)		1				
	1) JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda					4	
	2) JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda					3	
	3) JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama					2	
	4) JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama					4	
	5) Penelaah Teknis Kebijakan				7		
	6) Penata Layanan Operasional				3		
	7) Pengolah Data dan Informasi				2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	8) Pengadministrasi Perkantoran				3		
	9) Operator Layanan Operasional				2		
	10) Pengelola Umum Operasional				1		
	3) Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		1				
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda					3	
	2) JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda					1	
	3) JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama					1	
	4) Penelaah Teknis Kebijakan				6		
	5) Penata Layanan Operasional				2		
	6) Pengolah Data dan Informasi				3		
	7) Pengelola Layanan Operasional				1		
	8) Pengadministrasi Perkantoran				4		
	9) Operator Layanan Operasional				8		
	4) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3)		1				
	1) JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda					2	
	2) JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda					1	
	3) JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda					1	
	4) JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama					1	
	5) JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama					1	
	6) JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama					1	
	7) Penelaah Teknis Kebijakan				10		
	8) Penata Layanan Operasional				8		
	9) Pengolah Data dan Informasi				2		
	10) Pengelola Layanan Operasional				2		
	11) Pengadministrasi Perkantoran				4		
	12) Operator Layanan Operasional				18		
	5) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH)		1				
	1) JF Pengendali dampak Lingkungan Ahli Muda					3	
	2) JF Pengendali dampak Lingkungan Ahli Pertama					3	
	3) Penelaah Teknis Kebijakan				7		
	4) Penata Layanan Operasional				2		
	5) Pengolah Data dan Informasi				2		
	6) Pengadministrasi Perkantoran				3		
	7) Operator Layanan Operasional				3		
	6) Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya						
	1) JF Pengendali Dampak Ahli Madya					5	
	2) JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya					3	
	3) JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya					2	
	7) UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Wilayah I Kecamatan Siak						
	1) Kepala UPTD			1			
	2) Kasubbag Tata Usaha			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				1		
	2) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	8) UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Wilayah II Kecamatan Lubuk Dalam						
	1) Kepala UPTD			1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Kasubbag Tata Usaha			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				1		
	2) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	9) UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Wilayah III Kecamatan Tualang						
	1) Kepala UPTD			1			
	2) Kasubbag Tata Usaha			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				1		
	2) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	10) UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Wilayah IV Kecamatan Kandis						
	1) Kepala UPTD			1			
	2) Kasubbag Tata Usaha			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				1		
	2) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	Jumlah	1	5	10	157	54	
	Jumlah Total	227					

W. BUFATI SIAK,

AFNI. Z